

Tata Kelola Pemerintahan Nagari dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Aufial Hidayat¹, Nora Eka Putri²

^{1, 2}Prodi S2 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
aufialhidayat959@gmail.com

Abstract

Good governance serves as a key indicator of success for *Nagari* (traditional village) administration in delivering public services, fostering community participation, and promoting sustainable development. This study aims to analyze the implementation of good governance principles within the administration of *Nagari* Air Bangis, West Pasaman Regency. A qualitative approach utilizing a case study method was employed. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that efforts have been made to uphold the principles of transparency, participation, accountability, effectiveness, and the rule of law in the administration of the *Nagari*. However, several challenges persist, including limited administrative capacity, low community participation in decision-making processes, and suboptimal use of information technology in public service delivery. The study recommends strengthening the *Nagari's* institutional capacity, enhancing the digital literacy of administrative staff, and reinforcing participatory mechanisms to achieve more effective and accountable *Nagari* governance.

Keywords: Good Governance, Governance, *Nagari*, Community Participation, Air Bangis

Abstrak

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum telah diupayakan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Namun, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan nagari, peningkatan literasi digital aparatur, serta penguatan mekanisme partisipatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Good Governance, Tata Kelola Pemerintahan, Nagari, Partisipasi Masyarakat, Air Bangis

Copyright (c) 2026 Aufial Hidayat, Nora Eka Putri

✉ Corresponding author: Aufial Hidayat
Email Address: aufialhidayat959@gmail.com (Universitas Negeri Padang)
Received 20 Mei 2025, Accepted 28 Mei 2026, Published 25 Juni 2026

PENDAHULUAN

Good governance telah menjadi paradigma utama dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan demokratis. Dalam perspektif administrasi publik modern, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai aktor tunggal yang menentukan arah pembangunan, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (Denhardt & Denhardt, 2015).

Penerapan prinsip-prinsip good governance pada tingkat pemerintahan lokal memiliki arti strategis karena pemerintah daerah dan pemerintahan desa merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Dwiyanto, 2018).

Dalam konteks Indonesia, penguatan tata kelola pemerintahan desa memperoleh perhatian yang semakin besar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kewenangan yang semakin besar tersebut, pemerintah desa dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance agar pengelolaan sumber daya publik dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2014).

Di Sumatera Barat, sistem pemerintahan desa dikenal dengan istilah nagari yang memiliki karakteristik unik karena mengintegrasikan unsur pemerintahan formal dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Nagari tidak hanya berfungsi sebagai satuan administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat. Oleh sebab itu, tata kelola pemerintahan nagari tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai partisipasi, musyawarah, dan kebersamaan yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Muhammad, 2021).

Nagari Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu nagari yang memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang cukup besar. Sebagai wilayah pesisir yang berkembang, Air Bangis menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi tersebut, penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi kebutuhan yang mendesak guna memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan good governance di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur pemerintahan, kualitas kepemimpinan, transparansi pengelolaan keuangan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Khoiriah, 2022; Junaedi, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana tata kelola Pemerintahan Nagari Air Bangis dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya.

Konsep Good Governance

Good governance merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), good governance mencakup hubungan sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pembangunan. Konsep ini

menempatkan ketiga aktor tersebut sebagai elemen yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Good governance lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, praktik korupsi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat (UNDP, 1997).

Menurut Denhardt dan Denhardt (2015), paradigma administrasi publik modern menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengendali pembangunan (*steering*), tetapi juga sebagai pelayan masyarakat (*servicing*). Dalam perspektif ini, masyarakat diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar sebagai penerima layanan publik. Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian program pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menciptakan ruang partisipasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Khoiriah (2022) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, responsivitas, efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat, sedangkan transparansi memberikan jaminan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Khoiriah, 2022).

Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam good governance karena memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik serta mendorong terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi menuntut pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Dwiyanto, 2018).

Dalam konteks pemerintahan lokal, penerapan good governance memiliki peran strategis karena pemerintah daerah dan pemerintahan desa merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat. Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip good governance di tingkat lokal akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan lokal yang berkembang di Sumatera Barat dengan karakteristik berbasis adat dan partisipasi masyarakat. Sistem nagari mengintegrasikan fungsi pemerintahan formal dengan kelembagaan adat sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam sistem ini, nilai-nilai adat Minangkabau seperti musyawarah, mufakat,

kebersamaan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Muhammad, 2021).

Secara historis, nagari telah menjadi unit pemerintahan yang memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat Minangkabau. Nagari tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan nagari memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem pemerintahan desa di daerah lain karena melibatkan peran aktif lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat (Muhammad, 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, prinsip partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Berbagai kebijakan dan program pembangunan umumnya dirumuskan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip demokrasi lokal yang berakar pada tradisi musyawarah dalam budaya Minangkabau.

Keberhasilan tata kelola pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah lokal dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran nagari. Sementara itu, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka.

Di era digital saat ini, tata kelola pemerintahan nagari juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, pengelolaan administrasi pemerintahan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, digitalisasi pemerintahan juga dapat memperkuat transparansi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah nagari.

Dengan demikian, tata kelola pemerintahan nagari yang baik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur pemerintahan yang formal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah nagari dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi pelayanan publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan *good governance* di tingkat nagari dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam tata kelola pemerintahan Nagari Air Bangis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good*

governance. Lokasi penelitian berada di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari, perangkat nagari, anggota Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat yang dianggap memahami kondisi pemerintahan nagari. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti RPJM Nagari, APB Nagari, laporan pertanggungjawaban, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan nagari.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di nagari. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan guna mendukung dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tata kelola pemerintahan Nagari Air Bangis dalam mewujudkan good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pemerintahan Nagari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Air Bangis telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyelenggaraan musyawarah nagari, penyampaian laporan kegiatan pembangunan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Transparansi tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip good governance yang menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat, informasi mengenai program pembangunan dan penggunaan anggaran umumnya disampaikan melalui forum Musyawarah Nagari (Musnag), papan informasi nagari, serta pertemuan-pertemuan masyarakat. Selain itu, pemerintah nagari juga telah berupaya melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan program pembangunan agar informasi yang disampaikan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.

Penerapan transparansi tersebut memberikan dampak positif terhadap hubungan antara pemerintah nagari dan masyarakat. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengetahui arah pembangunan yang sedang dilaksanakan serta memahami prioritas penggunaan anggaran nagari.

Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan maupun kritik terhadap program-program yang dijalankan pemerintah nagari.

Namun demikian, keterbukaan informasi yang dilakukan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian masyarakat mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan anggaran nagari, realisasi pembangunan, maupun capaian program yang telah dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan.

Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas transparansi. Penyampaian informasi masih banyak dilakukan secara konvensional sehingga jangkauan informasi belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Padahal, perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik melalui media sosial, website nagari, maupun sistem informasi nagari berbasis digital.

Menurut Dwiyanto (2018), transparansi tidak hanya berarti membuka akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah dipahami, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas transparansi perlu dilakukan melalui pemanfaatan media digital dan sistem informasi publik yang lebih efektif. Dengan transparansi yang semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari juga akan meningkat sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam good governance karena masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Air Bangis telah dilibatkan dalam berbagai forum musyawarah pembangunan, termasuk Musyawarah Nagari dan Musrenbang Nagari.

Keterlibatan masyarakat terlihat dari kehadiran unsur niniak mamak, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, dan perwakilan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan program yang dianggap penting bagi pembangunan nagari.

Partisipasi tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah nagari untuk menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam forum musyawarah menunjukkan bahwa pemerintah nagari berupaya membangun komunikasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan.

Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh tokoh masyarakat dan kelompok tertentu, sedangkan keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan masih relatif

terbatas. Selain itu, tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan nagari.

Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat juga masih bersifat konsultatif, yaitu sebatas memberikan usulan tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir yang diambil pemerintah nagari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya hadir dalam forum musyawarah, tetapi juga memiliki peran yang lebih aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Junaedi (2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sering kali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan masyarakat secara substantif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif, pemberdayaan kelompok masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar proses pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Pemerintahan Nagari

Dalam aspek akuntabilitas, Pemerintah Nagari Air Bangis telah melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan dilakukan kepada pemerintah daerah serta disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran nagari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari secara rutin menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan sebagai bagian dari kewajiban administrasi pemerintahan. Keberadaan BAMUS juga berperan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran nagari. Peran BAMUS menjadi penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol dan memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan akuntabilitas yang baik dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah nagari. Masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung program pembangunan apabila terdapat kejelasan mengenai penggunaan anggaran serta hasil yang dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.

Meskipun demikian, kualitas akuntabilitas masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur nagari. Beberapa perangkat nagari masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan nagari.

Selain faktor sumber daya manusia, efektivitas pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah nagari juga masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan

program pembangunan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Menurut Ahli akuntabilitas yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan mekanisme pelaporan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi yang dapat diverifikasi dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur serta penguatan sistem administrasi berbasis digital menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan nagari yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang kuat, penyelenggaraan pemerintahan nagari dapat berlangsung secara lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Good Governance di Nagari Air Bangis

Penerapan prinsip-prinsip good governance di Nagari Air Bangis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan program pembangunan secara efektif dan akuntabel.

Salah satu faktor pendukung adalah adanya komitmen pemerintah nagari untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Komitmen tersebut terlihat dari pelaksanaan musyawarah nagari secara rutin, penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat, serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dukungan dari BAMUS, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari yang demokratis.

Selain itu, sistem pemerintahan nagari yang berlandaskan nilai-nilai adat dan musyawarah turut menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan good governance. Budaya musyawarah yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Nagari Air Bangis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi hambatan dalam penerapan good governance. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur nagari, terutama dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi. Kemampuan teknis yang belum merata dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik, pengelolaan data, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih efektif dan transparan.

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Penyampaian informasi kepada masyarakat masih banyak dilakukan secara konvensional sehingga akses informasi belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara cepat dan merata. Padahal, digitalisasi pemerintahan dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

Selain faktor internal, partisipasi masyarakat yang belum merata juga menjadi tantangan dalam mewujudkan good governance. Meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai forum musyawarah, tingkat keterlibatan aktif masih didominasi oleh kelompok tertentu. Keterlibatan perempuan, generasi muda, dan kelompok masyarakat lainnya masih perlu ditingkatkan agar proses pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh elemen masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan good governance di Nagari Air Bangis telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, penerapan prinsip-prinsip good governance diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendorong pembangunan nagari yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Analisis Sintesis

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Pemerintahan Nagari Air Bangis telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama pada aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut telah diimplementasikan melalui berbagai mekanisme pemerintahan, seperti pelaksanaan Musyawarah Nagari, penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah nagari untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip good governance tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek transparansi, informasi publik telah disampaikan kepada masyarakat, namun akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut masih belum merata. Pada aspek partisipasi, masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai forum pembangunan, tetapi keterlibatan aktif masih didominasi oleh kelompok tertentu sehingga belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang inklusif. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas, mekanisme pelaporan telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala terkait kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan good governance di Nagari Air Bangis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tingkat partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah nagari dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif good governance, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Transparansi yang baik akan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat karena masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang

dibutuhkan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat akan memperkuat akuntabilitas pemerintah melalui fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, semakin baik penerapan ketiga prinsip tersebut, maka semakin besar pula peluang terwujudnya pemerintahan nagari yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya mewujudkan *good governance* di Nagari Air Bangis perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sistem informasi nagari, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan nagari sekaligus mendukung terciptanya pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola Pemerintahan Nagari Air Bangis dalam mewujudkan *good governance* telah berjalan cukup baik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Nagari, penyampaian informasi pembangunan, serta pelaporan kegiatan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).

Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip *good governance* tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Transparansi informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, partisipasi masyarakat masih didominasi oleh kelompok tertentu, dan kualitas akuntabilitas masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur nagari serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan penerapan *good governance* di Nagari Air Bangis dipengaruhi oleh adanya komitmen pemerintah nagari, dukungan lembaga masyarakat dan adat, serta budaya musyawarah yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan diperlukan penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi nagari, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara lebih inklusif. Dengan upaya tersebut, Pemerintah Nagari Air Bangis diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dan akademis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan nagari. Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas aparatur nagari, peningkatan transparansi informasi publik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Nagari Air Bangis perlu mengembangkan mekanisme penyampaian informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat, serta

memperluas ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, agar proses pembangunan menjadi lebih inklusif dan partisipatif.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya penguatan peran BAMUS dan lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Kolaborasi yang baik antara pemerintah nagari, lembaga adat, dan masyarakat dapat menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan nagari yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengan pemerintahan desa pada umumnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan good governance tidak hanya ditentukan oleh aspek kelembagaan dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh digitalisasi pemerintahan, kepemimpinan nagari, dan peran kelembagaan adat terhadap efektivitas penerapan good governance di tingkat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Junaedi. (2023). Implementation of village governance based on principles of good governance of public service in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 249–266. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.160>
- Khoiriah, S. (2022). Pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan prinsip good governance. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19(1), 146–158. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i01.4828>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi Publisher.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muhammad, M. (2021). The practice of village governance: Comparing traditional form of desa and cultural form of nagari. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/jpan.v13i1.12470>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance dan good corporate governance* (Edisi revisi). Mandar Maju.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.

Zaitul, Z., Ilona, D., & Novianti, N. (2023). Good governance in rural local administration. *Administrative Sciences*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.3390/admsci13010019>